

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Wanita dan Pembangunan

Raharjo dalam Yefni (2001) mengemukakan bahwa pembangunan berdampak negatif kepada wanita karena perencanaan telah keliru dalam beberapa hal seperti: (1) gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisi telah dimainkannya; (2) mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi disekitar tugas rutin rumahtangga; (3) merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan yang paling cocok untuk wanita modern di masyarakat yang sedang berkembang.

Definisi tentang kerja seringkali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang tapi juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut serta penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan tersebut. Maka kecenderungan untuk membagi kerja tersebut, seperti kerja produksi dan reproduksi. Kerja produksi berarti kerja yang menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidup anggotanya atau kerja yang menghasilkan pendapatan atau bernilai ekonomis. Pekerjaan yang langsung menghasilkan pendapatan dianggap kerja produktif karena mempunyai nilai pasar atau nilai ekonomi. Sedangkan pekerjaan menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, berbelanja keperluan rumahtangga, pengulangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah tidak ada hasilnya dikategorikan pada kerja yang tidak produktif (Suryakusuma, 1981).

Sedangkan kerja reproduksi secara harfiah berarti menggantikan apa yang telah habis atau hilang untuk melestarikan system atau struktur sosial yang bersangkutan (Saptari, 1997). Edholl dkk dalam Saptari (1997) membedakan konsep reproduksi atas: (1) reproduksi biologis yaitu melahirkan anak; (2) reproduksi tenaga kerja yang berarti sosialisasi dalam pengasuhan anak, mempersiapkan mereka menjadi cadangan tenaga kerja berikutnya; dan (3) reproduksi sosial, yaitu kerja yang melestarikan status keluarga dan kegiatan-kegiatan untuk melestarikan komunitas sosial.

Pada Hakekatnya secara stratifikasi ada perbedaan motivasi wanita terjun dalam dunia kerja, paling tidak perbedaan antara golongan bawah dan golongan atas. Menurut Munandar (1985), motivasi wanita perkotaan bekerja antara lain: (1) menambah pendapatan keluarga; (2) secara ekonomis tidak tergantung pada suami; (3) menghindari dari rasa kebosanan atau mengisi waktu luang; (4) karena ketidakpuasan dalam pernikahan; (5) punya keahlian tertentu untuk dimanfaatkan; (6) memperoleh status sosial serta (7) untuk mengembangkan diri. Sedangkan bagi wanita pedesaan bekerja adalah sebagai suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan harian rumahtangga karena pendapatan yang diperoleh suami tidak mencukupi (Tati dalam Yefni 2001).

Hasil penelitian Luh Putu (1996), di Bali mengemukakan tentang strategi wanita dalam kebertahanan usaha dan rumahtangga, memanfaatkan jasa tengkulak, membinan hubungan baik dengan tengkulak, kerjasama antar sesama pedagang, pengembangan usaha melalui arisan dan tabungan. Sedangkan untuk urusan rumahtangga, menggunakan tenaga upahan atau memanfaatkan tenaga keluarga

yang ada dirumah. Sedangkan hasil penelitian Yefni (2001), untuk mengetahui curahan waktu wanita pedagang sayur untuk kerja produktif rata-rata 10,33 jam perhari sementara itu curahan waktu untuk kerja reproduktif rata-rata 4 jam perhari.

2. Partisipasi Wanita dalam Pembangunan

Partisipasi menurut Raharjo (1980) adalah keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah. Sedangkan Mubyarto (1997), mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi adalah sebagai bentuk keterlibatan secara aktif dan bermakna dari masyarakat pada tingkat yang berbeda, dimulai dari keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan (Slamet, 1992).

Secara lebih terperinci Ndraha (1980) mengemukakan adanya tiga hal pokok dalam pengertian partisipasi, yaitu: (1) titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional; (2) Kesediaan untuk memberikan kontribusi, wujud kontribusi dalam pembangunan; (3) Keberanian untuk menerima tanggungjawab atas suatu usaha. Untuk meningkatkan peran dan partisipasi wanita sebagai insan bagi pembangunan maka dibentuk berbagai program yang khusus untuk wanita antara lain, yaitu: program PKK, Posyandu, Program Usaha Peningkatan Gizi Keluarga, Pemberian Makanan Tambahan-Keluarga Sejahtera, Program Bina Balita dan lain-lain. Semua program tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan wanita dan anggota keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan wanita dan anggota keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan peran dan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan.

3. Peranan Agroindustri dalam Pembangunan

Berdasarkan perubahan lingkungan strategis dan gejala faktor eksternal (krisis ekonomi), terbangun wacana memposisikan sektor pertanian sebagai andalan atau penggerak utama pembangunan nasional. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah struktural pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh kontribusi kedua terbesar (18,84%) dalam pembentukan GDP (Growth Domestic Product), dominan dalam penyerapan tenaga kerja (45,00%), produktivitas sektor pertanian relatif masih rendah (25,00% produktivitas sektor non pertanian) dan masih besarnya pengangguran di daerah pedesaan (Sudaryanto, 2002). Mencermati hal tersebut pembangunan pertanian perlu diupayakan untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah menganekaragamkan produk pertanian diwujudkan melalui kebijakan ketahanan pangan. Program kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya terpusat pada peningkatan produktivitas petani selaku pemeran utama kegiatan pertanian. Kebijakan juga diarahkan kepada peningkatan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di sektor pertanian. Karena fakta membuktikan usaha kecil dan menengah mampu bertahan dari ambuknya perekonomian Indonesia. Fakta ini diperkuat oleh Dirjen Koperasi dan UKM (1999),

menyatakan bahwa usaha kecil memang baru memberikan kontribusi relatif rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu baru 38,9% tetapi telah mampu menyerap 88% tenaga kerja. Potensi usaha kecil sangat besar, dimana dari 38,9 juta pengusaha sebanyak 99,8% diantaranya adalah pengusaha kecil dan hanya 0,2% yang merupakan pengusaha menengah dan besar pada tahun 1998.

Menetapkan sektor pertanian sebagai dasar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan melalui pembangunan pertanian adalah langkah yang tepat. Clapham (1991) menyatakan tujuan utama semua kebijakan program pembangunan adalah pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di seluruh negeri. Mendorong pengusaha kecil dan menengah adalah salah satu strategi perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penyebaran industri ke daerah diantaranya: 1) menciptakan lapangan kerja untuk penganggur dan setengah penganggur; 2) menciptakan pusat-pusat pembaharuan dan perubahan ekonomi dan sosial dengan menggunakan sumber daya lokal sebaik-baiknya; 3) memenuhi kebutuhan penduduk di daerah terbelakang akan barang keperluan pokok dan barang konsumen yang bermutu.

Permasalahan yang sering dihadapi kebanyakan usaha kecil diantaranya aspek inovasi teknologi, produksi, finansial, manajemen, pemasaran hasil dan akses terhadap pelayanan pendukung. Selain itu permasalahan juga ditimbulkan kurangnya intervensi pemerintah (Sumardjo dkk, 2004). Sedangkan permasalahan yang dihadapi agroindustri adalah: 1) usaha agroindustri rumah tangga sifatnya mudah ke luar atau terlepas dari pasar; 2) produktivitas industri rendah dan upah juga rendah; 3) modal dapat dikatakan sangat kecil; 4) pekerja di sektor industri kecil biasanya merupakan

pekerjaan sampingan untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga (Tambunan dalam Wati, 2004).

Agroindustri sebagai salah satu subsistem penting dalam sistem agribisnis memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi karena pangsa pasar dan nilai tambah yang relatif besar dalam produksi nasional. Agroindustri dapat menjadi suatu sektor pemimpin yang didasarkan pada pemikiran bahwa agroindustri memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir. Keterkaitan ke hulu berupa penyediaan sarana produksi sedangkan keterkaitan ke hilir berupa terbukanya industri-industri pengolahan hasil pertanian serta lembaga-lembaga pendukung (Saragih, 2001).